

Capaian Kinerja dan realiasi anggaran Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022

Urusan		: OTONOMI DAERAH											
Nama Perangkat Daerah		: KECAMATAN LAPPARIAJA											
NO	KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET	ANGGARAN	REALISASI		PERSENTASE REALISASI		EFISIENSI	PERMASALAHAN	SOLUSI
							KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN			
1	Penguatan Kelembagaan, analisis jabatan, pelaksanaan dan peningkatan pelayanan publik	Program penunjang pemerintah daerah kabupaten/kota	Cakupan Realisasi penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	persentase	100	9,999,352,570.00	100	9,860,640,982.00	100	98.61	1.39	Belum optimalnya Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Perlu adanya Peningkatan Kinerja dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	100	47,814,790.00	100	47,814,790.00	100	100.00	0.00	Belum Optimalnya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perlu adanya Ketetapan Waktu dalam Hal Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	5	34,942,900.00	5	34,942,900.00	100	100.00	0.00	Usulan Perencanaan terkadang terhambat oleh terlambatnya Ketersediaan Satuan standar harga yang menyebabkan penginputan sering mengalami kendala	Perlu adanya Ketersediaan Satuan Standar Harga Sebelum Menyusun Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Program dan kegiatan perangkat daerah	Dokumen	3	12,871,890.00	3	12,871,890.00	100	100.00	0.00	Seringnya mengubah RKA karena adanya sub Kegiatan yang di geser akibat adanya Dana Penanganan Covid 19	Perlu adanya Ketersediaan Satuan Standar Harga Sebelum Menyusun Perencanaan Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuanga Perangkat Daerah	Bulan	100	9,662,403,120.00	100	9,524,305,696.00	100	98.57	1.43	Terjadinya perubahan pagu anggaran yang signifikan	Perlu diadakan keseuaian pagu anggaran mengikuti anggaran perubahan daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Realisasi pembayaran gaji dan tunjangan beserta tambahan penghasilan bulanan bagi ASN	Bulan	12	9,662,403,120.00	12	9,524,305,696.00	100	98.57	1.43	Sering terjadinya kelebihan Pagu anggaran	Perlu diadakan keseuaian pagu anggaran supaya tidak terjadi pengembalian
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Priodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Barang	Dokumen	100	9,840,400.00	100	9,840,400.00	100	100.00	0.00	Belum optimalnya Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah	Perlu adanya kelengkapan pengadministrasian Barang milik Daerah yang memadai

138,711,588.00

138,097,424.00

138,097,424.00

		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	Dokumen	1	9,840,400.00	1	9,840,400.00	100	100.00	0.00	Terkadang kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik	Diperlukan peralatan dan perlengkapan yang memadai sesuai dengan kebutuhan kantor
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Priodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase	100	136,617,880.00	100	136,617,880.00	100	100.00	0.00	Belum optimalnya Pelaksanaan Administrasi umum perangkat daerah	Perlu adanya kelengkapan pengadministrasian umum yang memadai
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket penyediaan alat Tulis kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	Paket	36	14,492,410.00	36	14,492,410.00	100	100.00	0.00	Terkadang kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik	Diperlukan peralatan dan perlengkapan yang memadai sesuai dengan kebutuhan kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket penyediaan makanan dan minuman harian bagi pegawai dan tamu sesuai rencana kebutuhab	Paket	3	52,835,470.00	3	52,835,470.00	100	100.00	0.00	kurangnya bahan makanan di SSh aset pada aplikasi	perlu penyempurnaan Standar harga yang signifikan pada aplikasi
		Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggadaan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggadaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	Paket	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	100	100.00	0.00	Penggadaan dokumen tersebar di beberapa sub kegiatan	penggadnaan dokumen seharusnya terpusat pada satu sub kegiatan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket penyediaan bahan cetakana dan peraturan perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan	Kali	2	3,600,000.00	2	3,600,000.00	100	100.00	0.00	kurangnya minta baca terhadap bacaan perundang - undangan	Perlu diadakan minat baca pada pegawai asn
		Penyelenggaraan Rpaat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti oleh aparat perangkat daerah	Kegiatan	50	60,690,000.00	50	60,690,000.00	100	100.00	0.00	Pemberian SPPD tidak menyeluruh di tiap Kepala seksi	perlu diadakan pembagian sppd pada semua kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	100	37,092,500.00	100	37,092,500.00	100	100.00	0.00	Pengadaan Barang Belum sepenuhnya terpenuhi	Perlu diadakan pengusulan Barang yang sesuai dengan kebutuhan

		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kanto sesuai rencana kebutuhan	Unit	5	37,092,500.00	5	37,092,500.00	100	100.00	0.00	Jumlah Pemakaian Bahan bakar minyak yang Tidak Menentu di setiap kali pemakaian yang dibarengi dengan kurangnya Kendaraan Transportasi Kantor	Penambahan kendaraan Dinas untuk Operasional Pelayanan kepada masyarakat dan Memperlancar kegiatan Monev ke desa-desa
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase	100	48,862,980.00	100	48,446,316.00	100	92.91	0.85	Kurang maksimalnya Pengelolaan penyediaan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah	Perlu adanya kesesuaian dalam pengelolaan penyediaan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket pembayaran jasa komunikasi jasa komunikasi bulanan (telepon/faximile, internet dan tv) sesuai rencana kebutuhan	kali	24	5,876,580.00	24	5,459,916.00	100	92.91	7.09	Karena Adanya Jumlah Pemakaian Listrik Yang Tidak Menentu di setiap bulan, Akhirnya Mempengaruhi Jumlah Anggaran Yang Terpakai	Perlu Adanya Kesesuaian Antara Jumlah Pemakaian Daya dengan Pelayanan Kinerja yang ada setiap bulannya.
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah realisasi pembayaran jasa/upah kerja bulanan bagi tenaga administrasi/tenaga teknis lainnya yang dipekerjakan yang dipekerjakan untuk pelaksanaan administrasi perkantoran	Orang	6	42,986,400.00	6	42,986,400.00	100	100.00	0.00	Adanya Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Tenaga Honoror yang Pembayaran tidak Sesuai di Setiap Bulannya	Perlu adanya Ketetapan Standar Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Honoror yang Merata Tiap Bulannya
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan	100	56,720,900.00	100	56,523,400.00	100	99.62	0.35	Kurang maksimalnya pemeliharaan Barang Milik Daerah	Perlu diupayakan sebaik mungkin terhadap pemeliharaan Barang Milik Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah paket pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Unit	2	51,840,000.00	2	51,642,500.00	100	99.62	0.38	Pemeliharaan Kendaraan yang terbatas dengan standar harga yang sudah ditentukan	perlu dilakukan koordinasi dengan aset terkait dengan biaya pemeliharaan kendaraan kepada aset
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sesuai rencana kebutuhan	Paket	1	4,880,900.00	1	4,880,900.00	100	100.00	0.00	kurangan pekerja yang biasa melakukan pemeliharaan Gedung Kantor	diperlukan pekerja yang lebih dalam rangka pemeliharaan gedung kantor secara berkala

416,664.00

416,664.00

197,500.00

197,500.00

2		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	persentase	100	15,127,450.00	100	15,127,450.00	100	100.00	0.00	Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Diperlukan kerjasama antar Tim dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan Da lam hal pelayanan Publik
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	1	15,127,450.00	1	15,127,450.00	100	100.00	0.00	Kurangnya Koordinasi antar Opd Tehnis	masih perlu pembagian kerja dalam hal penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal lainnya	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah yang diikuti dan dilaksanakan	Kegiatan	1	15,127,450.00	1	15,127,450.00	100	100.00	0.00	Pada saat pelaksanaan Musrenbang terkadang OPD pulang sebelum kegiatan berakhir	perlu diadakan rapat Tim dalam pelayanan sppd OPD yang datang bermusrenbang
3		Program pemberdayaan masyarakat dan desa	Cakupan Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase	100	15,000,000.00	100	15,000,000.00	100	100.00	0.00	Belum terpenuhinya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tepat waktu	Diperlukan adanya kerja sama antar Tim dalam hal penyelesaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan	2	15,000,000.00	2	15,000,000.00	100	100.00	0.00	Belum optimalnya kordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Diperlukan stekholder dan pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Desa
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kegiatan	2	15,000,000.00	2	15,000,000.00	100	100.00	0.00	Masih Kurangnya Kordinasi antar Desa sehingga Laporan Pokja Desa sering Terlambat yang mempengaruhi Keterlambatan Laporan FKKS dan TKSK	Perlu adanya Kordinasi dan Sinergitas antar Pokja Desa dan FKKS dalam Hal Penyusunan Laporan
4		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	persentase	100	27,000,000.00	100	27,000,000.00	100	100.00	0.00	Kordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum belum optimal	Diperlukan optimalisasi terhadap stakeholder dan pihak terkait dalam hal kordinasi ketentraman dan ketertiban umum

		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Orang	3	27,000,000.00	3	27,000,000.00	100	100.00	0.00	Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	meningkatkan Kordinasi dengan stakeholder terkait
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Orang	3	27,000,000.00	3	27,000,000.00	100	100.00	0.00	Koordinasi Lintas Sektor masih perlu ditingkatkan dalam rangka pengawasan yang lebih Komprehensif	Perlu Diadakan Rapat Kordinasi Lintas Sektor Secara Rutin dan Berkala
5		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintah desa	persentase	100	33,961,100.00	100	33,961,100.00	100	100.00	0.00	Belum sepenuhnya terpenuhi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	diperlukan Stakeholder dalam hal pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pegawasan Pemerintah Desa	Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Laporan	9	33,961,100.00	9	33,961,100.00	100	100.00	0.00	Belum Optimalnya Laporan Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Diperlukan partisipasi aktif bagi Kepala Desa dalam hal Pembinaan dan Pengawasan Desa
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes	Laporan	9	9,576,600.00	9	9,576,600.00	100.00	100.00	0.00	masih kurangnya partisipasi Desa dalam hal pelaporan pembuatan Peraturan Desa	perlu diadakan Bimbingan Teknis kepada para kepala para kepala desa dalam hal penyusunan Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa
		Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa	Laporan	9	24,384,500.00	9	24,384,500.00	100.00	100.00	0.00	masih kurangnya partisipasi Desa dalam hal pelaporan pembuatan Peraturan Desa	perlu diadakan Bimbingan Teknis kepada para kepala para kepala desa dalam hal penyusunan Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa
JUMLAH						10,090,441,120.00		9,951,729,532.00					



Labuhan Rintang, 24 Januari 2023
 Plt. Camat Labuhan Rintang
 YUSUF S. R. M. H.
 Pejabat Pembina Utama
 Nip.19690905 198903 1 005

9,999,352,570.00

47,814,790.00

34,942,900.00

12,871,890.00

9,662,403,120.00

9,662,403,120.00

136,617,880.00

14,492,410.00

52,835,470.00

5,000,000.00

3,600,000.00

60,690,000.00

37,092,500.00

37,092,500.00

48,862,980.00

5,876,580.00

42,986,400.00

56,720,900.00

51,840,000.00

4,880,900.00

15,127,450.00

15,127,450.00

15,127,450.00

15,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

27,000,000.00

27,000,000.00

27,000,000.00

33,961,100.00

33,961,100.00

24,384,500.00